

August 2017

Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah oleh HTI

Ali Kusno

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, alikusnolambung@gmail.com

Abd. Rahmad

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, abd.rahman_y@yahoo.com

Nur Bety

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, bety_salim@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://citeus.um.ac.id/jbs>

Recommended Citation

Kusno, Ali; Rahmad, Abd.; and Bety, Nur (2017) "Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah oleh HTI," *Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*: Vol. 45: No. 2, Article 4.

DOI: <https://doi.org/10.17977/um015v45i22017p143>

Available at: <https://citeus.um.ac.id/jbs/vol45/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by citeus. It has been accepted for inclusion in Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya by an authorized editor of citeus.

ANALISIS WACANA KRITIS PEMBENTUKAN STEREOTIP PEMERINTAH OLEH HTI

Ali Kusno, Abd. Rahmad, dan Nur Bety

Kantor Bahasa Kalimantan Timur

Abstract: This study aims to reveal the stereotypes about government formed by HTI in the propaganda bulletin articles published in *Al-Islam*. This study uses descriptive qualitative critical discourse analysis approach of Fairclough's models. Based on textual analysis (micro analysis), discourse practical analysis and socio-cultural practical dimension (macro) the bulletin indicates that HTI provides a solution by building a positive stigma against the struggle doctrine of HTI, namely the application of Islamic law and the need for Godly Muslim leaders. To reinforce the positive stigma about the ideology and the concept, HTI formed a variety of negative stereotypes of the Government by pointing at the Government's inability, liberal economic system, capitalist government partisanship, transactional politics and the Government's partisanship to foreign advantages. The formation of the various stereotypes may result in public antipathy towards the Government

Keywords: propaganda Bulletin *Al Islam*, critical discourse analysis, Analisis wacana kritis, negative stereotypes of government

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkapkan stereotip tentang pemerintah yang dibentuk HTI dalam artikel buletin dakwah *Al Islam*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan analisis wacana kritis model Fairclough. Sumber data dokumen bersumber dari artikel-artikel buletin dakwah *Al Islam*. Berdasarkan analisis tekstual, analisis praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya menunjukkan HTI memberikan solusi dengan membangun stigma positif terhadap garis perjuangan HTI, yakni penerapan syariat Islam dan perlunya pemimpin muslim yang bertaqwa. Untuk menguatkan stigma positif tentang ideologi dan paham itu, HTI membentuk beragam stereotip negatif tentang pemerintah seperti ketidakmampuan pemerintah, sistem ekonomi liberal, keberpihakan pemerintah pada kapitalis, politik transaksional, dan keberpihakan pemerintah pada asing. Pembentukan beragam stereotip itu dapat membentuk antipati masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: propaganda, buletin dakwah *Al Islam*, analisis wacana kritis, stereotip negatif pemerintah

Kebebasan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul setelah masa reformasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya. Sebagai akibat kebebasan itu muncul organisasi-organisasi dengan beragam latar belakang. Organisasi-organisasi ini dapat dikategorikan sebagai organisasi lokal, nasional, dan juga organisasi yang berafiliasi

dengan organisasi di luar negeri (transnasional). Keberadaan organisasi-organisasi ini memberikan khazanah baru bagi masyarakat. Sedangkan di sisi lain, keberadaan organisasi-organisasi tertentu juga berdampak negatif. Beberapa organisasi ditengarai berpaham radikal. Selain itu, juga terdapat organisasi transnasional yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memiliki data terkait organisasi kemasyarakatan yang anti-Pancasila. Seperti diberitakan *Harian Terbit* (Safari, 2016) Kemendagri Tjahjo Kumolo mengirimkan surat kepada Polri agar mencermati keberadaan ormas yang menganut paham anti-Pancasila. Sekecil apapun ormas itu walau hanya di tingkat kota/kabupaten jika membahayakan dan menyangkut stabilitas nasional harus dihentikan. Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan catatan terkait ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ormas yang tengah mendapat sorotan tajam adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI ditengarai sebagai kelompok yang anti terhadap pemerintahan Indonesia.

Sebaliknya, juru bicara HTI Ismail Yusanto (Safari, 2016) menegaskan organisasinya tidak anti-Pancasila dan tidak menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih lanjut disampaikan Ismail, selama ini HTI berdakwah dan berjuang untuk melindungi Indonesia dari paham neoliberalisme dan neoimperialisme. Untuk mewujudkan tujuan perjuangannya, HTI melancarkan empat program yang meliputi pengaderan, baik yang sifatnya perorangan atau *shahsiyah* maupun pembinaan yang sifatnya kolektif atau *jam'iyah*, *menta'bani* kemaslahatan umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat, dan pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam kacamata HTI adalah kaum penjajah yang kafir dan antek-anteknya (Afadlal et al., 2005). Khususnya program *menta'bani* HTI masif menyebarkan buletin bulanan atau mingguan *Al Islam* di masjid-masjid terutama setelah salat Jumat. Gambaran arah pemikiran HTI dapat terlihat melalui penggunaan bahasa artikel dalam buletin *Al Islam*.

Penelitian analisis wacana terhadap buletin *Al Islam* HTI pernah dilakukan. Ahmadi F, dkk. (2014) dalam *Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin AL-Islam yang Berjudul "Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan"*. Penelitian itu mengungkapkan bahwa HTI telah melakukan praktik sosial berupa pelancaran ideologi Islam dalam wacana kenaikan harga BBM 2013 di buletin *Al Islam* (Ahmadi F., 2014: 253-265). Dalam penelitian itu diungkapkan bahwa pada dasarnya dalam buletin *Al Islam* HTI menyampaikan realita persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. HTI pun menyampaikan solusi atas persoalan-persoalan itu dengan penerapan ideologi Islam. Hanya saja, dalam penelitian tersebut tidak digambarkan dengan luas dan mendalam tentang stereotipe pemerintah dari sudut pandang HTI. Padahal aneka stereotipe itu dapat menjadi celah bagi HTI memberikan penekanan terhadap paham dan ideologi HTI kepada umat dan masyarakat.

Pola pemikiran yang sama selalu digunakan HTI dalam setiap artikel di buletin *Al Islam*. Kekhilafahan selalu ditempatkan sebagai solusi akhir atas berbagai permasalahan di Indonesia. Pemerintah selalu ditempatkan sebagai pihak yang salah dalam konteks permasalahan yang berkembang. Secara tidak disadari masyarakat pembaca buletin *Al Islam* mendapat doktrin mengenai stereotip pemerintah versi HTI. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkapkan lebih dalam tentang stereotip HTI terhadap pemerintah dalam artikel buletin dakwah *Al Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan stereotip yang dibangun HTI tentang pemerintah dalam buletin dakwah *Al Islam*.

Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat (Bahasa, 2016). Berdasarkan definisi itu dapat dipahami bahwa stereotip sebagai pembentukan konsep terhadap sifat golongan yang didasari prasangka negatif dan subjektif. Samovar, Porter, dan Jain (dalam Rumondor, Paputungan, & Tangkudung, 2014) menggambarkan stereotip merujuk pada suatu keyakinan yang berlaku digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, sederhana, atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau kelompok orang tertentu. Dengan demikian, stereotip dapat dipahami sebagai konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka subjektif berlaku digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, sederhana, dilebih-lebihkan, dan tidak tepat.

Stereotip dapat dibangun melalui pembentukan opini dengan penggunaan bahasa di media. Menurut Thornborrow (2007: 78) media massa adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk mengakses informasi tentang dunia sekitar, dan sekaligus merupakan sumber dari sebagian besar kegiatan hiburan. Media menjadi tempat yang potensial untuk memproduksi dan menyebarluaskan makna sosial. Aspek yang paling menarik dan paling penting dari potensi kekuasaan media jika dilihat dari sudut pandang linguistik adalah cara media memberitakan orang dan kejadian (Thornborrow, 2007: 82). Level dari penggunaan bahasa itu disebut representasi bahasa. Beberapa struktur linguistik dapat menimbulkan berbagai versi dan pandangan yang berbeda.

Menurut Fairclough (Ahmadi F., 2014: 255) ideologi sebagai konstruksi makna memberikan kontribusi bagi pemroduksian, pereproduksian, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi. Teks berita termasuk dalam sebuah wacana. Istilah wacana yang digunakan dalam *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang dikembangkan para ahli linguistik sosial, di antaranya Norman Fairclough. Analisis wacana kritis Model Fairclough menempatkan wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial, wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu, dan wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (Ahmadi F., 2014: 255).

CDA model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014:255) ialah analisis tekstual, analisis praktik wacana, dan analisis sosiokultural. *Pertama*, analisis tekstual adalah analisis deskriptif terhadap dimensi teks. Dalam level ini dianalisis struktur teks, penggunaan gramatika transitif, dan analisis penggunaan kosakata. Pada bagian tata bahasa menurut Fairclough ada tiga aspek yang bisa dianalisis, yakni ketransitifan, tema, dan modalitas. Ketransitifan berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa, tema berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa, dan modalitas berkenaan dengan fungsi interpersonal bahasa (Eriyanto dalam Yusep Ahmadi F., 2014:257). *Kedua*, analisis praktik wacana adalah analisis interpretatif terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsi wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas. *Ketiga*, analisis sosiokultural adalah analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994: 6). Analisis kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan kerangka teori analisis wacana kritis model Fairclough (Ahmadi F., 2014:255). Objek penelitian ini adalah berita-berita yang dimuat dalam *Al Islam* terkait pengkritisan kinerja pemerintah. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

dokumen artikel-artikel berita di tabloid *Al Islam* yang dimuat dalam laman HTI yang berjudul ‘Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat,’ ‘Indonesia dalam Bahaya; dan ‘*Reshuffle* Kabinet Bukan Untuk Kepentingan Rakyat’. Sementara itu teknik analisis data menggunakan model interaktif, seperti yang dikemukakan Miles & Huberman (2007:19--20), yang terdiri atas tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel-artikel dalam tabloid *Al Islam* yang dimuat dalam laman HTI yang berjudul ‘Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat,’ ‘Indonesia dalam Bahaya; dan ‘*Reshuffle* Kabinet Bukan untuk Kepentingan Rakyat’ bisa merepresentasikan pandangan dan kepentingan HTI. HTI menggunakan media *Al Islam* dalam memandang dan memberi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu indikator kebenaran dugaan HTI bertentangan dengan Pancasila atau anti-Pancasila. Berikut ini analisis wacana kritis atas teks berita dalam tabloid *Al Islam* untuk mengidentifikasi stereotip yang dibangun HTI terhadap pemerintah.

Analisis Tekstual

Struktur Teks

Secara umum teks artikel dalam tabloid *Al Islam* terkait kritik terhadap kinerja pemerintah dalam penelitian ini, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Ketiga komponen itulah dikombinasikan membuat kerangka berpikir. Tujuan utama HTI dalam artikel itu lebih pada upaya penanaman ideologi yang ditekankan pada akhir artikel. HTI dalam perjuangannya berusaha untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Stigmatisasi tentang perlunya penerapan syariat Islam juga didengungkan HTI dalam artikel buletin dakwah *Al Islam*. Dalam data (1) artikel *Indonesia dalam Bahaya* HTI mengungkapkan stigmatisasi penerapan syariat Islam di Indonesia.

Data 1: Jelas, saat ini kita perlu mencampakkan sistem sekular dan menerapkan **sistem Islam** melalui **penerapan syariah Islam** secara menyeluruh dalam institusi **Khilafah Rasyidah**. Dengan **syariah Islam** kekayaan akan kembali seutuhnya untuk rakyat. Tentu karena dalam Islam kekayaan alam haram diserahkan kepada swasta apalagi asing. **Sistem ekonomi Islam** juga akan bisa mewujudkan distribusi kekayaan secara merata dan berkeadilan yang akan bisa memberikan kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat.... Pemberantasan korupsi akan bisa dilakukan secara tuntas dengan pemberlakuan **sanksi hukum Islam** yang tegas. Karena itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua untuk segera mewujudkan penerapan **syariah Islam** secara menyeluruh. (‘Indonesia dalam Bahaya’).

Dalam data (1) HTI berpendapat bahwa berbagai persoalan negara sebagai akibat logis dari penerapan sistem sekular kapitalisme dengan meninggalkan aturan-aturan Allah SWT. Menurut HTI, saat ini bangsa Indonesia perlu mencampakkan sistem sekular dan menerapkan sistem Islam melalui penerapan syariah Islam secara menyeluruh dalam institusi *Khilafah Rasyidah*. HTI berpandangan dengan syariah Islam kekayaan dapat kembali seutuhnya untuk rakyat. Stigmatisasi tentang penerapan syariat Islam juga terdapat dalam penggalan artikel berikut ini.

Data 2: Pangkal dari semua itu adalah penerapan ideologi sekularisme-kapitalisme dengan politik demokrasinya yang sarat dengan politik transaksional dan sistem ekonomi

liberalnya. Sudah terbukti semua itu telah membuat negeri ini terpuruk. Karena itu tidak layak sekularisme-kapitalisme dengan demokrasi dan liberalismenya itu terus dipertahankan. Semua itu harus ditinggalkan dan diganti dengan **sistem Islam**, dengan penerapan **syariah** secara menyeluruh. Syariah akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Jika sosialisme-komunisme dan sekularisme-kapitalisme telah terbukti rusak dan merusak, lalu **dengan apa lagi jika bukan dengan Islam dan syariahnya** kita bisa mewujudkan kehidupan yang baik untuk semua ('Resufle Kabinet Bukan untuk Kepentingan Rakyat').

Penggalan artikel seperti dalam data (2) HTI mengungkapkan bahwa perlunya penggantian sistem kenegaraan dengan sistem Islam. HTI berpandangan bahwa syariah akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Jika sosialisme-komunisme dan sekularisme-kapitalisme telah terbukti rusak dan merusak, lalu dengan apa lagi jika bukan dengan Islam dan syariahnya kita bisa mewujudkan kehidupan yang baik untuk semua. Bagi HTI, penerapan Syariat Islam merupakan solusi atas berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Dalam data (1) dan (2) tampak keduanya menguatkan stigma bahwa penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia akan membawa negara menjadi lebih baik.

HTI dalam artikel *Al Islam* menggunakan beragam pola argumentatif dengan menekankan ideologi-ideologi HTI. Salah satu stigma yang dibangun HTI tentang perlunya pemimpin muslim yang bertakwa seperti dalam data berikut ini.

Data 3: Semua itu makin menyadarkan kita bahwa kita butuh **pemimpin Muslim** yang bertakwa yang **menerapkan Islam**. Pemimpin Muslim yang bertakwa akan senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyat. ... Islam memiliki segenap aturan dan sistem yang bisa menjamin pelayanan kesehatan yang baik untuk seluruh rakyat. Sistem Islam terutama **sistem ekonomi Islam** akan bisa memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok untuk seluruh rakyat. Karena itu **penerapan syariah secara menyeluruh** oleh pemimpin Muslim yang bertakwa itulah yang harus segera diwujudkan bersama ('Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat').

Penggalan dalam data (3) HTI berargumen bahwa semua permasalahan makin menyadarkan bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin muslim yang bertakwa yang menerapkan nilai-nilai Islam. Menurut HTI pemimpin muslim yang bertakwa akan senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyat. Bagi HTI berbagai krisis terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan menyimpang manusia. Selama ini telah terbukti bahwa di tengah masyarakat dan bernegara banyak kemaksiatan dilakukan. Dalam sistem sekuler, Islam hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan Tuhannya. sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama ditinggalkan. Oleh karena itu, di tengah-tengah sistem sekuleristik, lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam, yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretik serta sistem pendidikan yang materialistik (HTI dalam Rahmat, 2005: 144).

Bagian pembuka ditandai dengan penggunaan judul berita. Sebuah judul dapat memberikan gambaran isi dari keseluruhan artikel. Selain itu, judul juga dapat menggambarkan cara pandang dan keberpihakan media terhadap artikel yang diturunkan. Pilihan kata yang digunakan dalam judul tentunya sangat memengaruhi makna yang disampaikan kepada pembaca. Selain itu, pilihan judul juga dapat menggiring opini pembaca. Judul-judul pemberitaan dalam *Al Islam* terkait kritikan terhadap kinerja Pemerintah Joko Widodo, di antaranya *Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat*; *Reshuffle Kabinet Bukan untuk Kepentingan Rakyat*; dan *Indonesia dalam Bahaya*. Ketiga judul tersebut menggunakan stigma negatif tentang

pemerintah sehingga membuka persepsi negatif terhadap pemerintah. Penggunaan kata negatif seperti ‘kegagalan sistemik’, ‘bukan untuk kepentingan rakyat’, dan ‘dalam bahaya’. Judul-judul itu sebagai representasi isi berita yang banyak berisi kritikan terhadap pemerintah.

Setelah judul, sebagai pembuka kerangka awal tentang pesan digambarkan berbagai fakta menurut versi HTI. Fakta-fakta yang disuguhkan memuat berbagai persoalan bangsa Indonesia saat ini. Dalam penyuguhan persoalan-persoalan tersebut termuat beragam stereotip tentang pemerintah yang dibangun HTI. Untuk mendukung pemahaman perlunya penerapan syariat Islam dan pemimpin muslim yang berakhlak tersebut, HTI membuat stereotip-stereotip tentang pemerintah dalam artikel *Al Islam*. Adapun stereotip-stereotip itu adalah sebagai berikut.

Pertama, stereotip kegagalan sistemik pemerintah dalam memelihara urusan rakyat. Stereotip bahwa pemerintah gagal dalam memelihara urusan rakyat terdapat dalam paragraf-paragraf pembuka dalam artikel buletin *Al Islam*.

Data 4: Dalam waktu-waktu terakhir sejak menjelang Ramadhan setidaknya ada tiga masalah yang menjadi topik pembicaraan masyarakat. Pertama, masalah kemacetan sangat parah pada saat mudik khususnya di Tol Cipali hingga Brebes dan setelah keluar pintu Tol Brebes Timur. Kedua, masalah harga-harga kebutuhan yang tidak terkendali sejak menjelang Ramadhan dan masih terasa hingga saat ini pada beberapa komoditi. Ketiga, masalah beredarnya vaksin palsu. Ketiga masalah itu paling tidak menunjukkan dua hal: lemahnya pengawasan oleh Pemerintah serta lemahnya aspek perencanaan dan antisipasi oleh Pemerintah. **Semua itu menunjukkan manajemen pengaturan urusan rakyat kedodoran dan kepemimpinan pengelolaan negeri ini masih lemah** ('Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat').

Seperti dalam data (4) HTI berusaha mengungkapkan fakta dan kerangka berpikir terkait kegagalan sistemik (pemerintah) dalam memelihara urusan rakyat. Hal itu didasarkan pada fakta-fakta permasalahan menjelang Ramadan yang menjadi topik pembicaraan masyarakat, yakni kemacetan sangat parah pada saat mudik, harga-harga kebutuhan yang tidak terkendali sejak menjelang Ramadan dan masih terasa hingga saat ini pada beberapa komoditi, dan beredarnya vaksin palsu. Bagi HTI ketiga masalah itu telah membuktikan lemahnya pengawasan, aspek perencanaan, dan antisipasi pemerintah. HTI memberikan penekanan bahwa manajemen pengaturan urusan rakyat kedodoran dan kepemimpinan pengelolaan negara masih lemah. Paparan fakta dan penilaian HTI membentuk stereotip bahwa berbagai persoalan bangsa membuktikan bahwa pemerintah gagal memelihara urusan rakyat.

Kedua, stereotip pemerintahan dalam bahaya. Beberapa kejadian separatisme berlangsung di daerah, seperti wilayah Papua. Mendasarkan kejadian-kejadian tersebut, HTI membangun stereotip bahwa keamanan nasional Indonesia dalam kondisi berbahaya. Stereotip seperti itu dibangun HTI seperti dalam penggalan artikel berikut ini.

Data 5: ... negeri ini sesungguhnya sedang dalam bahaya. **Pertama:** Adanya ancaman gerakan separatisme (pemisahan diri), khususnya Papua. Pada tanggal 13 Juli 2016, Kongres Nasional Papua Merdeka (KNPM) melakukan demonstrasi di Kota Jayapura. Mereka menuntut Papua lepas dari Indonesia. Salah satu jalan yang ditempuh adalah berupaya menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group (MSG).... Sayang, Pemerintah tidak bersikap tegas terhadap organisasi separatisme seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), juga terhadap aksi-aksi yang mendukung separatisme Papua ('Indonesia Dalam Bahaya').

Dalam penggalan data (5), HTI membangun stereotip bahwa negeri ini sesungguhnya sedang dalam bahaya, seperti adanya ancaman gerakan separatisme

(pemisahan diri), khususnya Papua. HTI menuding pemerintah tidak bersikap tegas terhadap organisasi separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), juga terhadap aksi-aksi yang mendukung separatisme Papua. Melalui paparan tersebut HTI berupaya membangun stereotip bahwa kondisi bangsa dalam bahaya terutama terkait isu disintegrasi bangsa. Berikut ini penggalan artikel buletin *Al Islam* yang juga menguatkan stereotip bahwa kondisi bangsa dalam bahaya.

Data 6: ... Sudah menjadi rahasia umum bahwa rezim saat ini didukung oleh para konglomerat. Tentu istilah *no free lunch* (tidak ada makan siang gratis) tetap berlaku. Artinya, dukungan para pengusaha besar tersebut kepada Pemerintah tidaklah cuma-cuma. Persoalan lainnya, utang dari China itu disertai dengan berbagai syarat yang makin merugikan bangsa ini.... masih banyak problem lainnya yang melanda negeri ini. Contohnya adalah problem minimnya pemasukan negara, melebarinya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, masih lemahnya pemberantasan korupsi dan seanebak problem lainnya. Semua problem dan beban itu harus dihadapi oleh rakyat negeri ini. Alhasil, negeri ini sedang dalam bahaya, dan tidak sedang baik-baik saja ('Indonesia Dalam Bahaya').

Dalam penggalan data (6), HTI juga memaparkan adanya ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. HTI memaparkan persoalan-persoalan lain, seperti masalah minimnya pemasukan negara, melebarinya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, masih lemahnya pemberantasan korupsi dan permasalahan lainnya. Berbagai paparan HTI tersebut membangun stereotip bahwa kondisi bangsa dalam bahaya. Hal itu dibangun HTI dengan merangkai permasalahan-permasalahan bangsa, terkait disintegrasi bangsa, masalah minimnya pemasukan negara, melebarinya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, masih lemahnya pemberantasan korupsi, dan banyak permasalahan lainnya.

Ketiga, stereotip pemerintah menjalankan sistem ekonomi liberal dan kapitalis. HTI dikenal getol dalam menentang dan memerangi paham neoliberalisme dan neoimperialisme. HTI selama ini khawatir karena kedua ideologi itu mengancam Indonesia dari berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Hal itulah yang sering diangkat HTI dalam artikel buletin *Al Islam* seperti berikut ini.

Data 7: *Reshuffle* kali ini membuat ekonomi negeri ini makin liberal. Sosok SM sudah dikenal berhaluan neoliberal. Bahkan SM dianggap bagian dari *Mafia Berkeley* yang membentuk perekonomian negeri ini bercorak neoliberal. Hal itu juga dibuktikan dengan kebijakan neoliberal selama SM menjadi menteri keuangan (menkeu) dulu. Saat itu SM mengeluarkan sejumlah kebijakan mulai dari pengurangan/penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi investasi, peningkatan pajak baik jenis maupun besarannya dan memperbesar utang terutama melalui Surat Utang Negara (SUN).

Dalam data (7) itu, HTI mengungkapkan bahwa *reshuffle* membuat ekonomi Indonesia semakin liberal. HTI menuding SM merupakan representasi neoliberal. Masuknya kembali SM dalam kabinet, HTI memprediksi penghapusan subsidi dapat berlanjut. Untuk menutupi defisit itu, pemerintah harus menggenjot penerimaan negara dengan mengandalkan *tax amnesty* (pengampunan pajak). Jika target tebusan *tax amnesty* tidak tercapai, HTI memperkirakan defisit akan diatasi dengan memangkas belanja. Namun, langkah ini membuat pemerintah sulit mencapai target pertumbuhan. HTI juga menuding bahwa terdapat kemungkinan defisit ditutup dengan utang. Paparan-paparan HTI terkait kebijakan pemerintah tentang ekonomi merepresentasikan stereotip bahwa pemerintah menjalankan ekonomi negara dengan mengedepankan liberalisme. Berikut ini artikel buletin *Al Islam* yang juga membentuk stereotip yang sama.

Data 8: *Reshuffle* juga memuluskan kepentingan para kapitalis. Pergantian menteri perhubungan akan memuluskan proyek kereta cepat. Pergantian Rizal Ramli dengan Luhut B. Pandjaitan juga akan memuluskan proyek reklamasi. ... Kepentingan kapitalis dalam bidang minerba dan migas juga akan lebih terlayani. Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, revisi UU Migas menjadi prioritasnya. Ia mengaku siap merombak beberapa kebijakan di sektor energi yang menghambat investasi. ... Proyek gas Blok Abadi Masela di Laut Arafuru juga akan mulus. Freeport juga akan segera mendapat jaminan.

Dalam data (8), HTI menuduh pemerintah dalam melakukan *reshuffle* untuk memuluskan kepentingan para kapitalis. Pergantian menteri perhubungan akan memuluskan proyek kereta cepat. Pergantian Rizal Ramli dengan Luhut B. Pandjaitan juga demi memuluskan proyek reklamasi. Kepentingan kapitalis dalam bidang minerba dan migas juga dapat lebih terlayani. HTI juga menuduh pemerintah melindungi kepentingan Freeport. Hal itu menguatkan Stereotip bahwa pemerintah menjalankan ekonomi negara dengan mengedepankan liberalisme. Berdasarkan paparan data (7) dan (8) HTI membentuk stereotip bahwa pemerintah menjalankan ekonomi negara dengan mengedepankan liberalisme dan kepentingan kapitalis.

Keempat, stereotip pemerintah melakukan politik transaksional. Pembentukan stereotip bahwa pemerintah melakukan konsolidasi politik transaksional terlihat dalam artikel buletin *Al Islam*. Berikut ini penggalan artikel yang membentuk stereotip pemerintah melakukan politik transaksional.

Data 9: ... Tampak, konsolidasi politik itu kental dengan aroma politik transaksional atau bagi-bagi jabatan. Padahal pada masa kampanye Pilpres, Jokowi menjanjikan hal itu tidak akan terjadi. Faktanya, justru bagi-bagi jabatan itu terjadi sejak awal pemerintahannya. Alhasil, dukungan politik di DPR kepada rezim Jokowi makin solid. Dengan itu, berbagai kebijakan rezim Jokowi yang makin liberal juga akan mulus ('Indonesia Dalam Bahaya').

Dalam data (9), HTI juga menyerang pemerintah dengan menuding adanya konsolidasi politik kental dengan aroma politik transaksional atau bagi-bagi jabatan. Padahal pada masa kampanye pemilihan presiden, Jokowi menjanjikan tidak akan terjadi politik transaksional. HTI menyerang pemerintah bahwa justru bagi-bagi jabatan itu terjadi sejak awal pemerintahan. Alhasil, dukungan politik di DPR kepada rezim Jokowi makin solid. Dengan itu, berbagai kebijakan rezim Jokowi yang makin liberal juga akan mulus. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah bagi HTI merupakan politik transaksional. Paparan tersebut menguatkan stereotip bahwa pemerintah melakukan konsolidasi politik transaksional.

Kelima, stereotip pemerintah membuat kebijakan untuk kepentingan asing. Stereotip bahwa kebijakan pemerintah untuk kepentingan asing terdapat dalam artikel buletin *Al Islam*. Stereotip ini terdapat dalam berikut ini.

Data 10: ... Pemerintahan Jokowi sangat memperhatikan kepentingan Cina, terutama dalam dua bidang: infrastruktur dan perdagangan. Utang dari Cina mendominasi pembiayaan infrastruktur. ... Adapun Barat, terutama Amerika dan Eropa, merasa kepentingannya kurang diperhatikan. Kepentingan Barat selama ini tampak dominan dalam dua bidang: pasar keuangan serta pertambangan minerba dan migas. Jika kepentingan Barat itu tidak segera dipenuhi, hal itu bisa jadi akan "mengganggu". Untuk memenuhi kepentingan Barat itu dibutuhkan sosok yang "*market's trusted*" (dipercaya pasar). Sosok Sri Mulyani (SM) dinilai tepat. Pasar pun menyambut positif *reshuffle*. IHSG dan kurs Rupiah menguat. Sosok SM juga dianggap bisa menarik investasi, khususnya *hot money* (uang panas) ('Reshuffle Kabinet Bukan Untuk Kepentingan Rakyat').

Dalam penggalan data (10), HTI mengungkapkan pembuka persoalan Presiden Jokowi telah mengumumkan *reshuffle* kabinet pada Rabu, 27 Juli 2016 di Istana. Sebanyak 12 posisi menteri dirombak. HTI memandang *reshuffle* kabinet itu demi Cina dan Amerika/Eropa. HTI menganggap Pemerintahan Jokowi sangat memperhatikan kepentingan Cina, terutama dalam dua bidang, yaitu infrastruktur dan perdagangan. Utang dari Cina mendominasi pembiayaan infrastruktur. HTI menuduh kepentingan investasi Cina itu terwakili melalui sosok Menteri BUMN.

Berbagai stereotip tentang pemerintah tersebut merupakan upaya HTI untuk membentuk persepsi di masyarakat ada sesuatu yang salah dalam pemerintahan dan negara ini. Berbagai stereotip tersebut secara terus menerus ditekankan HTI kepada kalangan pembaca. Pembentukan stereotip-stereotip tersebut disertai dengan solusi yang ditawarkan oleh HTI untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia. Solusi-solusi HTI dituangkan sebagai bentuk positif mengenai ideologi HTI. Untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti yang tergambarkan dalam stereotip tentang pemerintah tersebut, HTI mengajukan solusi fundamental dan integral, yakni syariat Islam. Solusi fundamental dan integral yang dimaksud tidak lain adalah dengan cara mengakhiri sekulerisme dan menegakkan kembali seluruh tatanan kehidupan masyarakat dengan syariat Islam (Rahmat, 2005:144).

Penggunaan Ketransitifan

Aspek ketransitifan dalam artikel buletin *Al Islam* menunjukkan bahwa HTI menguatkan hal-hal negatif dan mengurangi hal positif terhadap pemerintah. Terdapat penekanan terhadap stereotip negatif yang melekat pada pemerintah. Penggunaan hal-hal negatif tersebut untuk mengungkapkan kelemahan pemerintah dan kebijakannya. Dalam artikel ‘Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat’, HTI menggunakan kata-kata bernuansa negatif seperti *masalah kemacetan, harga-harga tidak terkendali, lemahnya pengawasan pemerintah, buruknya perencanaan dan antisipasi, macet sangat parah, gagal mengantisipasi, dan lebih menyedihkan*.

Dalam artikel ‘Indonesia dalam Bahaya’, terdapat kata-kata bernuansa negatif yang merujuk pada pemerintah, seperti membiarkan ancaman terhadap kedaulatan, melebarnya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, lemahnya pemberantasan korupsi dan seanebak problem lainnya, negeri ini sedang dalam bahaya. Sedangkan dalam artikel ‘Reshuffle Kabinet Bukan untuk Kepentingan Rakyat’ terdapat kata-kata negatif berupa *demi Cina dan Amerika/Eropa*, pemerintahan Jokowi sangat memperhatikan kepentingan Cina, *hot money* dan utang, *makin liberal, memuluskan kepentingan kapitalis, konsolidasi politik dan politik transaksional “imbangan”, dan rezim Jokowi makin solid*. Tema berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa dalam artikel *Al Islam* sebagai sarana menyebarkan ideologi HTI. Selanjutnya, fungsi modalitas dalam artikel buletin *Al Islam* berupa pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan kelemahan pemerintah dan memberikan solusi berupa penerapan syariat Islam.

Penggunaan Kosakata

Kosakata yang digunakan dalam artikel buletin *Al Islam* menggunakan bahasa secara langsung yang menyerang pemerintah.

Data 10: Semua itu menunjukkan manajemen pengaturan urusan rakyat kedodoran dan kepemimpinan pengelolaan negeri ini masih lemah (Kegagalan Sistemik Memelihara Urusan Rakyat).

Data 11: Pangkal dari semua itu adalah penerapan ideologi sekularisme-kapitalisme dengan politik demokrasinya yang sarat dengan politik transaksional dan sistem ekonomi liberalnya. Sudah terbukti semua itu telah membuat negeri ini terpuruk (Reshuffle Kabinet Bukan untuk Kepentingan Rakyat).

Dalam dua penggalan artikel secara jelas menunjukkan bahwa HTI menyerang pemerintah secara langsung. Seperti dalam data (10), terdapat tuturan *menunjukkan manajemen pengaturan urusan rakyat kedodoran dan kepemimpinan pengelolaan negeri ini masih lemah*, sedangkan dalam data (11) pernyataan menyerang *dengan sudah terbukti semua itu telah membuat negeri ini terpuruk*. Sudah terbukti semua itu telah membuat negeri ini terpuruk. Selain itu, juga terdapat penggalan artikel yang menggunakan bahasa kasar dan merendahkan pemerintah. Penggunaan bahasa sindiran juga ditemukan dalam artikel *Al Islam*. Sindiran/ironi adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan kata atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Ironi akan berhasil kalau pembaca juga menyadari maksud yang disembunyikan di balik rangkaian kata-katanya (Keraf, 2006). Berikut ini penggunaan ironi dalam artikel buletin *Al Islam*.

Data 12: Semua itu makin menyadarkan kita bahwa kita butuh pemimpin Muslim yang bertakwa yang menerapkan Islam. Pemimpin Muslim yang bertakwa akan senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyat).

Seperti dalam penggalan artikel (12) tersebut secara tersirat HTI menyerang Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang diragukan keislamannya sekaligus diragukan ketakwaannya. Ketiga data tersebut menunjukkan kecenderungan penggunaan kosakata negatif apabila bersinggungan dengan pemerintah.

Dimensi Praktik Wacana

Analisis teks dilanjutkan pada analisis praktik wacana. Menurut Fairclough (Ahmadi F., 2014:261) analisis praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya menyelidik proses apakah yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan apa yang dialami sebelum disebarluaskan. Artikel dalam tabloid *Al Islam* diproduksi HTI sebagai sarana *menta'bani* kemaslahatan umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat. Program *menta'bani* HTI dengan masif menyebarkan buletin bulanan atau mingguan di masjid-masjid terutama setelah shalat Jumat. Melalui bahasa artikel tersebut dapat memberikan gambaran arah pemikiran HTI. Pandangan dan tujuan HTI tersebutlah yang berusaha dituangkan dalam teks berita buletin dakwah *Al Islam*. Harapannya tentu paham-paham HTI dapat dipahami dan diikuti masyarakat Indonesia.

Penyebaran buletin *Al Islam* merupakan realisasi misi HTI. HTI memiliki tiga misi, yakni melanjutkan kehidupan Islam; pembentukan khilafah dengan memperluas jaringan; dan mengedukasi masyarakat agar dapat berpikir dan bertindak secara Islami (Afadlal *et al.*, 2005:276--278). Aktivitas HTI itu merupakan upaya membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia.

Berbagai serangan terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk stereotip negatif tentang pemerintah. Berbagai kondisi itu yang mendasari HTI menawarkan solusi perlu penerapan Syariat Islam dan perlunya pemimpin muslim yang bertakwa. Solusi-solusi tersebut disajikan HTI dalam upaya membangun stigma positif terhadap garis perjuangan HTI. Bagi HTI semua *mabda'*

(ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya. HTI juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali *dawlah* Islam sebagai negara terkemuka di dunia (“HizbutTahrir,” 2016).

Dimensi Praktik Sosial Budaya

Penilaian terhadap artikel dalam buletin dakwah HTI *Al Islam* tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya Indonesia. Dalam perjuangannya, HTI memprioritaskan penegakan *Daulah Islamiyyah* dan kekuasaan daripada perbaikan aqidah dan tauhid. HTI telah menjadikan penegakan *daulah* saat ini hukumnya paling wajib dan paling mendesak. HTI berpandangan bahwa segala kemerosotan, kehancuran, dan kekacauan yang melanda umat saat ini disebabkan tidak adanya payung yang melindungi umat dari kaum kuffar, yakni daulah khilafah. Bagi HTI semenjak Kesultanan Utsmani runtuh, pada tahun 1924 di Turki, umat Islam semuanya dalam keadaan berdosa dan umat wajib mengembalikannya (Saifullah, 2013). Bagi sebagian umat Islam, retorika HTI tentang mengembalikan kejayaan Islam melalui sistem kepemimpinan Khilafah mungkin terkesan menarik. Namun kalau dipelajari, sistem pemerintahan yang ditawarkan sebenarnya mengandung banyak persoalan serius (“10 Sesat Pikir Hizbut Tahrir,” 2016).

Stereotip yang dibangun HTI merupakan upaya untuk merendahkan pemerintah di mata rakyat Indonesia. Setelah berbagai stereotip negatif pemerintah dilancarkan dilanjutkan dengan stigmatisasi penerapan syariat Islam dan pemimpin yang bertaqwa. Beragam stereotip negatif dan stigma HTI dalam artikel buletin dakwah *Al Islam* merupakan bagian dari upaya penanaman ideologi. Sedangkan ideologi yang diusung HTI jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Apabila paham dan ideologi tersebut terus dilakukan secara masif dapat menimbulkan sesat pikir di masyarakat. Tidak semua masyarakat yang menerima informasi buletin *Al Islam* dapat memilah dan mencerna pesan yang disampaikan. Hal itulah yang dikhawatirkan timbulnya paham-paham radikal karena pemahaman dan pengetahuan agama yang kurang dalam konteks kebhinekaan.

PENUTUP

HTI sebagai organisasi transnasional ditengarai sebagai organisasi yang anti-Pancasila. HTI gencar menyebarluaskan paham-pahamnya melalui artikel-artikel *Al Islam* yang disebar di masjid-masjid terutama setelah shalat Jumat. Berdasarkan hasil analisis wacana kritis terhadap teks berita dalam tabloid *Al Islam* yang dimuat dalam laman terdapat temuan terkait upaya pembentukan stereotip negatif tentang pemerintah seperti ketidakmampuan pemerintah, sistem ekonomi liberal, keberpihakan pemerintah pada kapitalis, politik transaksional, dan keberpihakan pemerintah pada asing. Berbagai serangan terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk stereotip negatif tentang pemerintah. Berbagai kondisi tersebut yang mendasari HTI menawarkan solusi perlu penerapan Syariat Islam dan perlunya pemimpin muslim yang bertaqwa. Solusi yang disajikan HTI membangun stigma positif terhadap garis perjuangan HTI.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa HTI memprioritaskan penegakan *Daulah Islamiyyah* dan kekuasaan di Indonesia sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ada. HTI berpandangan bahwa segala kemerosotan, kehancuran, dan kekacauan yang melanda umat saat ini disebabkan tidak adanya payung yang melindungi umat dari kaum *kuffar*, yakni *daulah* khilafah. Bagi sebagian umat Islam, retorika HTI itu sebenarnya mengandung banyak persoalan serius. Ideologi yang diangkat dan diperjuangkan HTI dalam teks berita buletin dakwah *Al Islam* jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, paham dan ideologi yang disebarkan masih dalam bentuk buletin tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- 10 Sesat Pikir Hizbut Tahrir. 2016. *Online*: <http://www.madinaonline.id/wacana/perspektif/10-sesat-pikir-hizbut-tahrir/>
- Afadlal, dkk. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. (E. Turmudi & R. Sihbudi, Eds.). Jakarta: LIPI Press.
- Ahmadi F., Y., Darmayanti, N., Wahya, NFN. 2014. Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin *Al-Islam* yang berjudul “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Kemiskinan.” *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 12 (2)(Analisis Wacana Kritis), 253–265.
- BP2B. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Fauzan, U. 2014. Analisis Wacana Kritis Teks Berita Metro TV dan Tv-One mengenai Luapan Lumpur Sidoarjo. *Online*: <http://pasca.uns.ac.id/?p=3074>
- HizbutTahrir. 2016. *Online*: https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir
- Keraf, G. 2006. *Diksi dan Gaya Bahasa* (16th ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Purbani, W. 2009. Analisis Wacana Kritis dan Analisis Wacana Feminis. *Online*: <http://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-purbani-ma/analisis-wacana-kritis.pdf>.
- Rahmat, M. I. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Timur Tengah ke Indonesia*. (S. Mahdi & S. Bhawono, Eds.) (I). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rumondor, F. H., Paputungan, R., & Tangkudung, P. 2014. Stereotipe Suku Minahasa terhadap Etnis Papua) Studi Komunikasi Antarbudaya pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi). *Journal Acta Diurna*, Volume 3 N. *Online*: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/viewFile/5038/4555>
- Safari. 2016. Polri Ungkap Data Ormas Anti-Pancasila, Bagaimana dengan HTI? *Online*: <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/05/11/61528/0/25/Polri-Ungkap-Data-Ormas-Anti-Pancasila-Bagaimana-dengan-HTI>
- Saifullah, U.A.F.U. bin A. 2013. Apa itu Gerakan Hizbut Tahrir? Banyak sekali yang tertipu dengan dalih pendirian khilafahnya.. padahal.... *Online*: <https://aslibumiayu.net/4796-apa-itu-gerakan-hizbut-tahrir-banyak-sekali-yang-tertipu-dengan-dalih-pendirian-khilafahnya-pada.html>
- Thornborrow, J. 2007. Bahasa dan Media. In Thomas, L. & Wareing, S. (Eds.), *Bahasa, Masyarakat, & Kekuasaan* (78–103). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.